

10/953

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDIK : 10 / 953

NOMOR KLAS

A S A I : B / (S) / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 064 /J.A/6/1989

TENTANG

PENYELENGGARAAN DISKUSI ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam Repelita V, peningkatan kualitas penegakan hukum mendapat perhatian yang besar dan akan dijabarkan secara konseptual dan programatis pada keseluruhan fungsi, tingkatan dan kegiatan - Kejaksaan.

Penjabaran Repelita V Kejaksaan antara lain meliputi upaya untuk lebih memantapkan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat dengan pendekatan yang bersifat holistik. Hal ini berarti bahwa tugas penegakan hukum itu adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pelayanan hukum di sektor pertanahan dalam Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, perlu ditumbuh kembangkan kesamaan persepsi dan langkah antar semua pihak dan instansi serta sektor - pembangunan yang terkait.

c. bahwa untuk itu, dalam memperingati Hari Bhakti - ADHYAKSA tanggal 22 Juli 1989, Kejaksaan akan menyelenggarakan Diskusi ADHYAKSA dengan topik: "TANAH DAN PEMBANGUNAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM".

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentu
an-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Ta
hun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan
Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

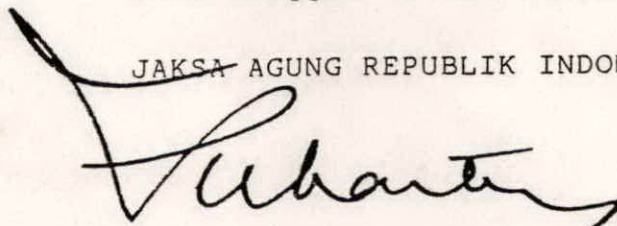
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PE-
NYELENGGARAAN DISKUSI ADHYAKSA.
- Pertama : Menyelenggarakan Diskusi Adhyaksa dengan topik " TA-
NAH DAN PEMBANGUNAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM ", pada
tanggal 17 Juli 1989.
- Kedua : Membentuk Panitia Penyelenggara Diskusi Adhyaksa de-
ngan susunan sebagai tercantum dalam Lampiran I.
- Ketiga : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran
II sebagai Penyaji Makalah, Pembahas dan Peserta.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kepu -
tusan ini, dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan A -
gung Republik Indonesia.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, de -
ngan catatan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan -
ditambah apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 26 Juni 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



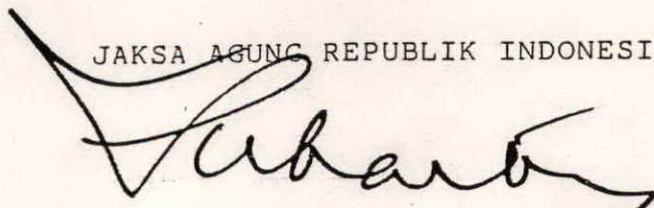
SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

Lampiran I Keputusan Jaksa Agung R.I.
Nomor : KEP-064/J.A/6/1989
Tanggal: 26 J u n i 1989

SUSUNAN PANITIA DISKUSI ADHYAKSA

- I. Panitia Penyelenggara (OC):
- Pelindung : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
Penasehat : PARA JAKSA AGUNG MUDA.
Ketua Penyelenggara : Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung RI
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum
Kejaksaan Agung RI.
- Seksi-seksi
1. Naskah/Persidangan : Kepala Bagian Humas dan Protokol Ke-
jaksaan Agung RI.
2. Akomodasi, Perjalanan/ : Kepala. Bagian Rumah Tangga Kejaksa-
Konsumsi an Agung RI.
3. Pembantu Umum : 1. Kepala Bagian Keamanan Dalam Ke-
jaksaan Agung RI.
2. Panitia Hari Bhakti Adhyaksa.
- II. Nara Sumber : 1. Anggota Staf Ahli.
2. Anggota Kelompok Kerja Pemikir -
Hukum Kejaksaan Agung RI.
3. Anggota Kelompok Diskusi Tetap -
Kejaksaan Agung RI.
- III. Moderator : 1. T.A. Rahman, SH.
2. Prof.Dr.Komar Kantaatmadja, SH.
3. Prof. Padmo Wahjono, SH.
- Sekretaris : R.M. Soeripto, SH..
Wakil Sekretaris : Supangat, SH.
- IV. Panitia Pengarah (SC) :
1. Ketua : Koordinator Staf Ahli.
2. Wakil Ketua : Dr. Andi Hamzah, SH.
3. Anggota : 1. Haryono Dipowidjojo,SH.
2. Sidharta Tjokrowasito, SH
3. Drs. Sutradara Gintings
4. Wim Theorupun, SH
5. Soewarno, SH.
6. R. Poediono, SH.
7. Dr. T. Amir Hamzah, SH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

PENYAJI, PEMBAHAS MAKALAH DAN PESERTA DISKUSI

I. PENYAJI.

1. Ir. Sonny Harsono / Kepala BPN.
" Aspek Teknis tentang Administrasi Tanah Pembangunan "
2. Prof. Dr. Budi Harsono, SH
" Aspek Perlindungan Hak dan Kepentingan Tanah Rakyat dalam Pembangunan "

II. PEMBAHAS.

1. Oka Mahendra, SH / Komisi II DPR-RI.
2. Drs. Ferry Soneville / Ketua REI.
3. Sulaeman Ardjasasmita, SH / Ketua INI.
4. Haryono Tjitrosubono, SH / Ketua KADIN.
5. Prof. Dr. I Made Sandi / Ilmuwan.

III. PESERTA DISKUSI.

1. Mayjen Pol. Drs. Ahmad Djuaeni / Mabe Polri.
2. Singgih, SH / Kejaksaan Agung R.I.
3. R.B. Sukardi, SH / Persaja.
4. A. Soejadi, SH / Ikahi.
5. Albert Hasibuan, SH / Persahi.
6. Bismar Siregar, SH / Mahkamah Agung R.I.
7. Suhadibroto, SH / Kajati DKI Jakarta.
8. Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber-Daya Alam / BAPPENAS.
9. Ir. Piek Mulyadi, SH / Dirjen Bangda Depdagri.
10. Ir. Aca Sugandhi Apandi MSc / Asmen Menneg KLH. Bidang Sumber Alam.
11. Ir. Armana Darsidi / Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi lahan Departemen Kehutanan.
12. Bachrum Saleh Harahap, SE / Kepala Badan Litbang Departemen Perindustrian.
13. Dr. Sutatwo Hadiwigeno / Kepala Badan Litbang Departemen Pertanian.

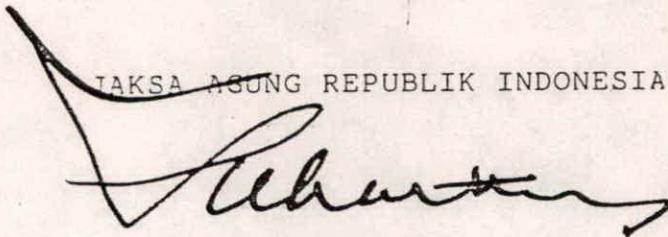
14. Ir. Kosim Gandataruna....

14. Ir. Kosim Gandataruna / Dirjen Pertambangan Umum Departemen Pertambangan & Energi.
15. Ir. Sardjono / Asisten Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pengembangan Perumahan.
16. Ir. Soebandi Wirosoemarto / Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum.
17. Ir. Soenarjono Danoedjo / Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
18. Drs. Atar Sibero / Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri.
19. Departemen Pertanahan HKTI.
20. Deputy Bidang Perencanaan dan Promosi BKPM.
21. Kol. Drs. Syaafroedin Bahar / Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.
22. Brigjen TNI Iskandar Kamil, SH / Ka Babinkum ABRI.
23. Din Muhammad, SH / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
24. Mohammad Hasan Basri, SH / Irjen Departemen Koperasi.
25. Ir. Djatijanto Kretosastro MSc / Dirjen Penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi.
26. Marsda Kahardiman, SH / Bakorstranas.
27. Saleh Baharis, SH / Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.
28. Ditjen Pajak Departemen Keuangan R.I.
29. Direksi Bank Indonesia.
30. Direktur Utama BRI.
31. Letkol Heri Effendi, SH / Staf Ahli Bidang Hukum Menko Polkam.
32. Taufik Hidayat, SH / Ketua Komisi III DPR-RI.
33. Dr. A. Baramuli, SH / Kadin.
34. Ketua Gapensi.
35. Bas Tobing, SH / Kejaksaan Agung R.I.
36. I. Agus Suhadi, SH / Kejaksaan Agung R.I.
37. H. Ridwan Sani, SH / Kajati Jawa Tengah.
38. I Yoman Suwandha, SH / Kajati Jawa Timur.
39. Soegeng S. Marsigit, SH / Kejaksaan Agung R.I.
40. I Made Suwinda, SH / Kejaksaan Agung R.I.
41. T.M. Sitompul, SH / Kejaksaan Agung R.I.
42. Made Wibawa Utra, SH / Kejaksaan Agung R.I.

43. Achmad Hambali, SH...

- 43. Achmad Hambali, SH / Ass. Intel Kejati Jawa Barat.
- 44. Soeyono, SH / Kajari Bogor.
- 45. Suhandjono, SH / Kejari Bekasi.

AKSA ASUNG REPUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukarton', with a large, sweeping initial stroke.

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH